



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG
PETA JALAN (*ROADMAP*) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN 2025-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa Peta Jalan (*Roadmap*) merupakan langkah penting dalam upaya pengendalian inflasi di Daerah yang diharapkan mampu memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026 dan Tahun 2027, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025-2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026 dan Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN (*ROADMAP*) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2025-2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peta Jalan (*Roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah adalah rencana strategis yang memberikan arahan dalam pengendalian Inflasi Daerah.
6. Inflasi Daerah adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu di Kabupaten Sumbawa.

Pasal 2

Peta Jalan (*Roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025-2027 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan Pengendalian Inflasi di Daerah selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

Peta Jalan (*Roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan Peta Jalan (*Roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025-2027 bersumber dari:

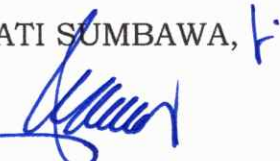
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

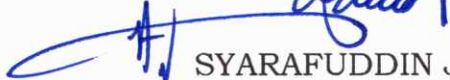
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 September 2025

BUPATI SUMBAWA, 


SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
PETA JALAN (ROADMAP) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN 2025-2027.

STRATEGI 4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	TIMELINE TARGET			PIC
			2025	2026	2027	
KETERJANGKAUAN HARGA	Stabilisasi Harga	1. Pemantauan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditi subsidi dan/atau Harga Acuan Pembelian dan Penjualan	4 kali/ Masa panen/ Masa tanam	4 kali/ Masa panen/ Masa tanam	4 kali/ Masa panen/ Masa tanam	- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah - Dinas Pertanian - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan - Badan Urusan Logistik (Bulog)
		2. Pemantauan Harga Barang Pokok dan Barang Penting	2 kali seminggu	2 kali seminggu	2 kali seminggu	- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah - Dinas Pertanian - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan - Badan Urusan Logistik (Bulog)

		3. Menjaga stabilitas Harga dan Stok Bahan Pokok melalui Koordinasi dengan Perangkat Daerah	12 kali	12 kali	12 kali	- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah - Dinas Pertanian - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan - Badan Urusan Logistik (Bulog) - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		4. Optimalisasi Kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Beras	Ton per Tahun	Ton per Tahun	Ton per Tahun	- Badan Urusan Logistik (Bulog) - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah - Dinas Pertanian - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
		5. Operasi Pasar	Minimal 3 kali	Minimal 3 kali	Minimal 3 kali	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah - Dinas Pertanian - Dinas Ketahanan Pangan





						- Badan Urusan Logistik (Bulog) - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		6. Pasar Murah	Minimal 2 kali	Minimal 2 kali	Minimal 2 kali	- Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Pertanian - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan - Badan Urusan Logistik (Bulog) - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
		7. Meningkatkan koordinasi dan ikut serta dalam menjaga keseimbangan internal perekonomian	Minimal 2 kali	Minimal 2 kali	Minimal 2 kali	- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
	Mengelola Permintaan	8. Perluasan cakupan Gerakan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) melalui pemanfaatan dana desa dan dana kelurahan.	52 Desa	8 Kelurahan 52 Desa	53 Desa	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TPPK) - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan

14

		9. Pemanfaatan Teknologi dalam meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Minimal 4 Teknologi	Minimal 4 Teknologi	Minimal 4 Teknologi	- Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah - Dinas Pertanian - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
KETERSEDIAAN PASOKAN	Produksi Domestik	1. Pengembangan Industri Pakan Ternak dan Pakan Ikan	Penguatan Sistem Produksi	Penguatan Korporasi	Penguatan Korporasi dan Persiapan Pengembangan Pasar	- Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah - Dinas Pertanian - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
		2. Pengembangan hortikultura (cabai, sayur, buah, dll)	5 kampung	5 kampung	5 kampung	- Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Pertanian
		3. Pembangunan dan optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur pertanian - Pengembangan irigasi perpompaan - Pengembangan perpipaan - Pembangunan Sumur Bor	3.000 meter / tahun 4.941 meter / tahun 50 % 75% 100 %			- Dinas Pertanian

		- Pembangunan Cetak Sawah Baru - Pengembangan Alsintan - Penyediaan perbenihan - Pembangunan Jalan Usaha Tani - Penyerapan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN)	50 %	75%	100 %	
		4. Penerapan praktek budidaya sesuai <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP), <i>Good Handling Practices</i> (GHP) & <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP). - Peningkatan jumlah kebun/lahan/usaha sesuai dengan GAP, GHP dan GMP	5% per tahun	5% per tahun	5% per tahun	- Dinas Pertanian - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
		5. Peningkatan produksi protein hewani - Peningkatan produksi perikanan - Peningkatan produksi peternakan	10% / thn	10% / thn	10% / thn	- Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		6. Peningkatan produksi padi	5% / tahun	5% / tahun	5% / tahun	- Dinas Pertanian - Dinas Ketahanan Pangan
		7. Peningkatan produksi jagung	3% / tahun	3% / tahun	3% / tahun	
		8. Peningkatan produksi garam	10%/ tahun	10%/ tahun	10%/ tahun	

		9. Peningkatan produksi bawang	10%/ tahun	10%/ tahun	10%/ tahun	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
		10.Peningkatan produksi cabai	10%/ tahun	10%/ tahun	10%/ tahun	- Badan Urusan Logistik (Bulog)
		11.Peningkatan produksi telur ayam ras	10%/ tahun	10%/ tahun	10%/ tahun	- Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		12.Modernisasi Pengolahan dan Penyimpanan Produk Pertanian, Perikanan dan Peternakan: - Peningkatan fasilitas sarana prasarana pasca panen komoditas (perikanan, pertanian dan peternakan)	5 % / tahun	5 % / tahun	5 % / tahun	- Dinas Pertanian - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	13.Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah - Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Pusat - Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Daerah - Gabah setara beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) - Cadangan Jagung Pemerintah (CJP)	10.000 ton 12.000 ton 10.000 ton 10.000 ton	10.000 ton 12.000 ton 10.000 ton 10.000 ton	10.000 ton 10.000 ton 10.000 ton 10.000 ton	- Badan Urusan Logistik (Bulog) - Dinas Ketahanan Pangan
	Mekanisme Ekspor Impor	14.Peningkatan Ekspor Daerah	5 % / tahun	5 % / tahun	5 % / tahun	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan

						- Dinas Pertanian - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Dinas Kelautan dan Perikanan
		15. Pembangunan Fasilitas Ekspor Daerah	Penyiapan lahan dan <i>Detail Engineering Desain</i> (DED)	Pembangunan	Pemanfaatan	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
		16. Koordinasi kelancaran ekspor impor daerah melalui pintu ekspor impor daerah	4 kali	4 kali	4 kali	- Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Badas Karantina Badas
	Penguatan Kelembagaan	17. Penguatan kelembagaan petani, peternak, nelayan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui : - Korporasi petani, peternak dan nelayan - Fasilitasi kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) - Koperasi/Perbankan - Fasilitasi Perijinan	3 korporasi 3 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	3 korporasi 3 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	3 korporasi 3 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	- Dinas Pertanian - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Unsur Perbankan

		18. Peningkatan transaksi Sistem Resi Gudang (SRG)	9% Sistem Resi Gudang (SRG)	12% Sistem Resi Gudang (SRG)	14% Sistem Resi Gudang (SRG)	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
KELANCARAN DISTRIBUSI	Penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD)	1. Inisiasi Kerja sama Antar Daerah (KAD)	Kabupaten Sumbawa Barat	Pulau Lombok	Pulau Bali	- Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
		2. Fasilitasi distribusi pangan oleh mitra	1 Mitra	1 Mitra	1 Mitra	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
		3. Peningkatan infrastruktur konektivitas - Kedatangan Tol Laut sesuai jadwal - Peningkatan kondisi jalan mantap	100% 1,77%	100% 1,87%	100% 1,97%	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perhubungan
		4. Penguatan implementasi digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)/Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pangan sisi hilir - Digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) - Digitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	50% 50%	75% 75%	100% 100%	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KOMUNIKASI EFEKTIF	Memperbaiki Kualitas Data	1. Pemantauan sistem informasi panel harga dan memonitoring stok pangan strategis yang terintegrasi	Melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) (https://hargapangan.id/)			- Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		2. Pemantauan data pasokan, pemantauan harga barang pokok dan barang strategis	Melalui Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi (SIANDINI) (https://siandini.sumbawakab.go.id/)			- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Koordinasi Pusat dan Daerah	3. Penyusunan Peta Jalan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa	100%			- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
		4. Monitoring dan evaluasi Peta Jalan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa	12 kali	12 kali	12 kali	- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
		5. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (seminar/pelatihan/ <i>high level meeting</i>)	1 kali	1 kali	1 kali	- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
		6. Penyebaran Informasi Harga , Edukasi Publik tentang Inflasi, dan Transparansi Harga sebagai bagian dari upaya komunikasi efektif yang menjamin keterbukaan informasi, dan menjaga kepercayaan masyarakat,	12 kali	12 kali	12 kali	- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan

		serta memperkuat daya beli masyarakat.				- Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Dinas Kelautan dan Perikanan
--	--	--	--	--	--	--

BUPATI SUMBAWA, f



SYARAFUDDIN JAROT